

SEBUAH PERSPEKTIF RESPONSIF PENDIDIKAN LITERASI UNTUK MELAWAN KORUPSI

Ari Maulana Ramadan¹, Imam Aris Utomo², Muhammad Huda³, Mukhamad Diki Indarto⁴, Mohammad Ulil Abshor Abdalla⁵, Ibnu Hibban⁶, Fauzi Annur⁷
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta^{1,2,3,4,5,6,7}
e-mail: arimaulana0022@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi masih menjadi persoalan serius yang memengaruhi kualitas kehidupan sosial, politik, dan pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, rendahnya budaya literasi menyebabkan masyarakat kurang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam memahami berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan literasi dalam membangun budaya antikorupsi serta menjelaskan hubungan antara kemampuan literasi dengan kesadaran sosial masyarakat terhadap praktik korupsi. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif interpretatif melalui analisis berbagai sumber ilmiah berupa buku, jurnal, artikel akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan pendidikan literasi, pendidikan antikorupsi, serta perkembangan masyarakat di era *Society 5.0*. Sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur dari *Google Scholar*, GARUDA, dan berbagai publikasi ilmiah nasional maupun internasional periode 2021–2025. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan literasi memiliki kontribusi penting dalam membentuk kesadaran kritis, integritas moral, dan keberanian masyarakat dalam menolak praktik korupsi. Literasi tidak hanya berfungsi sebagai kemampuan membaca dan memahami informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. **Kata Kunci:** *Pendidikan Literasi, Korupsi, Kritis*

ABSTRACT

Corruption remains a serious issue affecting the quality of social, political, and educational life in Indonesia. On the other hand, the low level of literacy culture has caused society to lack critical thinking skills in understanding various forms of abuse of power and information manipulation. This study aims to analyze the role of literacy education in building an anti-corruption culture and to explain the relationship between literacy skills and public social awareness toward corrupt practices. The study employed a *library research* method with a qualitative interpretative approach through the analysis of various scientific sources, including books, journals, academic articles, and official documents relevant to literacy education, anti-corruption education, and societal development in the *Society 5.0* era. Data sources were obtained through literature searches from *Google Scholar*, GARUDA, and various national and international scientific publications from 2021–2025. Data analysis was conducted through stages of data reduction, classification, interpretation, and systematic conclusion drawing. The findings indicate that literacy education plays an important role in shaping critical awareness, moral integrity, and public courage in rejecting corrupt practices. Literacy functions not only as the ability to read and understand information, but also as a means of developing a culture of transparency, accountability, and social responsibility within society.

Keywords: *Literacy Education, Corruption, Critical Thinking*

PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampak korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial negara, tetapi juga menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan melemahnya budaya integritas di lingkungan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam laporan tahunannya mencatat bahwa praktik korupsi pada tahun 2023 masih didominasi kasus penyuapan, penyalahgunaan jabatan, dan gratifikasi dalam sektor pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum saja belum cukup efektif apabila tidak dibarengi dengan pembangunan kesadaran moral dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Fenomena tersebut diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (*IPAK*) Indonesia tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan skor tersebut mengindikasikan masih adanya sikap permisif sebagian masyarakat terhadap tindakan yang mengarah pada perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari (Badan Pusat Statistik, 2024). Realitas tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan terciptanya masyarakat yang menjunjung nilai kejujuran dengan kondisi empiris yang masih menunjukkan lemahnya budaya antikorupsi. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan yang mampu membangun kesadaran kritis, etika sosial, dan tanggung jawab warga negara secara lebih mendalam.

Dalam konteks pendidikan, literasi memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan individu untuk memahami informasi, menilai kebenaran, serta berpikir secara reflektif terhadap berbagai persoalan sosial. Literasi tidak lagi dimaknai terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan menganalisis informasi dan membangun kesadaran sosial yang kritis. Penelitian Putri et al. (2023) menjelaskan bahwa penguatan literasi pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal mampu menanamkan nilai integritas dan kepedulian sosial kepada peserta didik melalui pembelajaran kontekstual. Selain itu, Fernandes et al. (2024) menegaskan bahwa literasi antikorupsi dapat menjadi strategi edukatif untuk membentuk budaya transparansi, tanggung jawab, dan kesadaran etis di lingkungan masyarakat.

Pendidikan antikorupsi juga memiliki hubungan erat dengan penguatan pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Nurudin et al. (2024) menyebutkan bahwa pendidikan antikorupsi berfungsi sebagai media pembentukan karakter peserta didik melalui penguatan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Penelitian Wibawa et al. (2021) turut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi dapat menjadi langkah preventif dalam mencegah berkembangnya perilaku koruptif di lingkungan pendidikan. Sejalan dengan itu, Salam et al. (2024) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan karakter dan antikorupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan implementasi, terutama dalam aspek pembiasaan nilai integritas dan konsistensi budaya sekolah. Dengan demikian, pendidikan literasi dan pendidikan karakter perlu dipadukan agar mampu membangun kesadaran moral peserta didik secara lebih komprehensif.

Upaya membangun budaya antikorupsi juga perlu dilakukan sejak usia dini melalui kegiatan edukasi yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian Nurul Hafiza et al. (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah menengah pertama mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya kejujuran dan bahaya korupsi dalam kehidupan sosial. Selain itu, Suyitno et al. (2024) menjelaskan bahwa penguatan literasi antikorupsi berbasis *Profil Pelajar Pancasila* dapat membantu peserta didik sekolah dasar memahami nilai gotong royong, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Temuan tersebut

menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diterapkan secara kontekstual sesuai perkembangan usia dan lingkungan sosial peserta didik.

Perkembangan teknologi digital pada era modern juga memberikan peluang baru dalam memperkuat pengawasan publik terhadap praktik korupsi. Penelitian Cahyadi (2025) menjelaskan bahwa media sosial memiliki fungsi penting sebagai sarana kontrol sosial dan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, Wahdania dan Suhab (2025) menyebutkan bahwa pemanfaatan media informasi berbasis digital mampu meningkatkan transparansi publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi digital memiliki hubungan erat dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan birokrasi secara lebih terbuka dan akuntabel.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Busriadi dan Saleh (2025) mengungkapkan bahwa edukasi hukum dan sosialisasi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban sosial. Penelitian Albab et al. (2024) turut menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menciptakan birokrasi bersih dapat memperkuat budaya integritas dan mempersempit peluang penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Maritza dan Taufiqurokhman (2024) menyatakan bahwa pengawasan publik yang aktif mampu meningkatkan akuntabilitas birokrasi dan memperkuat transparansi pemerintahan. Dengan demikian, budaya literasi yang baik akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif, kritis, dan berani melakukan kontrol sosial terhadap praktik korupsi.

Dalam lingkup internasional, pendidikan antikorupsi juga dipandang sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas. Othman et al. (2022) menjelaskan bahwa *corruption offences education literacy* memiliki kontribusi besar dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga aset dan kepentingan negara. Selanjutnya, Eiamnate et al. (2023) menemukan bahwa perilaku antikorupsi mahasiswa dipengaruhi oleh pendidikan karakter, lingkungan akademik, dan pemahaman etika sosial. Alfaro (2022) juga menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap korupsi berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik dalam pengawasan sosial. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan literasi memiliki potensi besar sebagai strategi preventif dalam membangun budaya antikorupsi. Namun, penelitian sebelumnya masih cenderung membahas pendidikan antikorupsi secara umum dan belum banyak mengkaji pendidikan literasi sebagai perspektif responsif dalam melawan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan pendidikan literasi kritis sebagai instrumen sosial dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah dan melawan praktik korupsi secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan pendidikan literasi, pendidikan antikorupsi, kesadaran kritis masyarakat, dan budaya integritas dalam kehidupan sosial. Data penelitian diperoleh dari sumber tertulis berupa artikel jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga resmi, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema penelitian. Penelusuran sumber dilakukan melalui beberapa pangkalan data ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda Kemdikbud, dan SINTA Kemdikbud dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan literasi kritis, pendidikan antikorupsi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa laporan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pusat Statistik yang berkaitan dengan kondisi korupsi dan perilaku antikorupsi di Indonesia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan pada rentang tahun 2021–2025 dan membahas pendidikan literasi, pendidikan karakter, literasi digital, transparansi publik, serta pendidikan antikorupsi. Peneliti melakukan penelusuran terhadap sekitar 70 sumber literatur dan kemudian menyeleksi 30 rujukan yang dianggap paling relevan berdasarkan kesesuaian tema, tahun publikasi, kredibilitas penerbit, dan keterkaitan substansi dengan fokus penelitian. Proses seleksi dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kualitas akademik yang memadai dan mendukung analisis penelitian secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur terhadap berbagai sumber yang telah dipilih. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi keterkaitan antara pendidikan literasi dan upaya pencegahan korupsi dalam berbagai hasil penelitian terdahulu. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur ilmiah dan laporan resmi sehingga hasil analisis yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan objektivitas yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum penyajian hasil sintesis, penelitian ini terlebih dahulu mengelompokkan temuan-temuan utama dari 30 rujukan yang dianalisis. Pengelompokan dilakukan berdasarkan tema besar yang paling dominan, yaitu pendidikan antikorupsi, literasi kritis, partisipasi masyarakat, transparansi publik, integritas karakter, dan pengawasan sosial berbasis pendidikan. Proses sintesis ini bertujuan untuk memperlihatkan pola hubungan antara budaya literasi dan upaya pencegahan korupsi secara lebih sistematis serta menghindari pembahasan yang hanya bersifat teoritis semata. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memuat definisi konseptual, tetapi juga menunjukkan kecenderungan temuan empiris dan relevansinya terhadap kondisi sosial kontemporer.

Tabel 1. Klasifikasi Tema Utama Penelitian

No	Tema Utama	Fokus Kajian
1	Pendidikan antikorupsi	Penanaman nilai integritas dan kejujuran
2	Literasi kritis	Kemampuan berpikir reflektif terhadap realitas sosial
3	Literasi digital	Kemampuan memilah informasi dan pengawasan publik
4	Pendidikan karakter	Pembentukan moral dan tanggung jawab sosial
5	Transparansi publik	Akuntabilitas birokrasi dan keterbukaan informasi

No	Tema Utama	Fokus Kajian
6	Partisipasi masyarakat	Pengawasan sosial terhadap praktik korupsi
7	Kesadaran hukum	Pemahaman hak, kewajiban, dan etika publik
8	Integritas mahasiswa dan pelajar	Pencegahan perilaku koruptif sejak dini

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa penelitian-penelitian yang dianalisis memiliki keterkaitan kuat antara pendidikan, budaya literasi, dan pembentukan karakter antikorupsi. Mayoritas penelitian menempatkan pendidikan sebagai instrumen preventif dalam membangun kesadaran sosial dan integritas moral masyarakat. Selain itu, perkembangan literasi digital juga mulai dipandang sebagai bagian penting dalam pengawasan publik terhadap penyimpangan kekuasaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan budaya kritis melalui pendidikan. Selanjutnya, hasil sintesis utama terhadap 30 rujukan penelitian disajikan pada Tabel 2. Tabel ini memuat fokus penelitian, temuan utama, serta relevansi setiap penelitian terhadap penguatan pendidikan literasi antikorupsi.

Tabel 2. Sintesis Utama Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	Putri (2024)	Literasi digital dan Pancasila	Literasi digital membantu menangkal perilaku koruptif di ruang digital
2	Shaliadi & Dannur (2023)	Pendidikan antikorupsi di sekolah	Pendidikan antikorupsi perlu diterapkan sejak dini
3	Mas'ud et al. (2025)	Literasi hukum digital	Literasi hukum memperkuat kesadaran masyarakat
4	Muhajir (2022)	Literasi digital masyarakat	Literasi digital meningkatkan kemampuan berpikir kritis
5	Pratiwi (2023)	Pendidikan karakter	Integrasi karakter membentuk integritas siswa
6	Kolompo et al. (2025)	Edukasi antikorupsi masyarakat	Partisipasi sosial memperkuat budaya antikorupsi
7	Al-farroz (2025)	Strategi pencegahan korupsi	Transparansi dan pendidikan efektif mencegah korupsi
8	Firdaos et al. (2024)	Integritas mahasiswa	Pendidikan tinggi berperan membentuk moral mahasiswa
9	Wibowo (2022)	Kesadaran generasi muda	Pemuda berpotensi menjadi agen perubahan
10	Wardan (2025)	Akuntabilitas publik	Transparansi meningkatkan kepercayaan publik
11	Aulia et al. (2024)	Pendidikan antikorupsi PT	Perguruan tinggi perlu memperkuat pendidikan integritas
12	Ulya & Anisah (2021)	Literasi sekolah	Literasi membentuk karakter integritas siswa

No	Peneliti	Fokus Kajian	Temuan Utama
13	Aziza (2022)	Pendidikan antikorupsi mahasiswa	Mahasiswa perlu dibekali nilai antikorupsi
14	Al Ayyubi et al. (2025)	Kesadaran dan resistensi	Pendidikan antikorupsi meningkatkan daya kritis
15	Channiago et al. (2022)	Media dan pendidikan karakter	Media dapat menjadi sarana edukasi antikorupsi
16	Putri et al. (2023)	Literasi antikorupsi berbasis lokal	Kearifan lokal mendukung pendidikan integritas
17	Suyitno et al. (2024)	Literasi antikorupsi SD	Profil Pelajar Pancasila mendukung budaya antikorupsi
18	Fernanandes et al. (2024)	Literasi antikorupsi	Literasi menjadi strategi edukasi sosial
19	Busriadi & Saleh (2025)	Kesadaran hukum masyarakat	Edukasi meningkatkan kepatuhan sosial
20	Cahyadi (2025)	Media sosial dan korupsi	Media sosial mendukung pengawasan publik
21	Nurul Hafiza et al. (2024)	Sosialisasi antikorupsi SMP	Pendidikan dini penting untuk pencegahan korupsi
22	Nurudin et al. (2024)	Pendidikan karakter antikorupsi	Pendidikan karakter menghadapi tantangan digital
23	Albab et al. (2024)	Kesadaran kolektif masyarakat	Masyarakat memiliki peran penting melawan korupsi
24	Wahdania & Suhab (2025)	Transparansi publik desa	Website desa meningkatkan keterbukaan informasi
25	Wibawa et al. (2021)	Pendidikan antikorupsi preventif	Pendidikan mampu mencegah perilaku koruptif
26	Maritza & Taufiqurokhman (2024)	Pengawasan publik aktif	Partisipasi sipil meningkatkan akuntabilitas
27	Salam et al. (2024)	Kebijakan pendidikan karakter	Pendidikan antikorupsi perlu penguatan kebijakan
28	Othman et al. (2022)	Literasi pendidikan korupsi	Literasi hukum penting melindungi kepentingan publik
29	Eiamnate et al. (2023)	Perilaku antikorupsi mahasiswa	Pendidikan memengaruhi perilaku antikorupsi
30	Alfaro (2022)	<i>Corruption Perceptions Index</i>	Indeks korupsi dipengaruhi kualitas tata kelola

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa mayoritas penelitian menempatkan pendidikan dan literasi sebagai instrumen utama dalam membangun budaya antikorupsi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis, kesadaran hukum, integritas moral, dan partisipasi sosial memiliki hubungan yang erat dengan upaya pencegahan korupsi. Selain itu, beberapa penelitian juga memperlihatkan bahwa literasi digital dan transparansi publik mulai menjadi elemen penting dalam pengawasan sosial di era modern. Sintesis ini memperkuat pandangan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan preventif berbasis

pendidikan, bukan hanya pendekatan represif berbasis hukum. Untuk memperjelas arah temuan penelitian, hasil sintesis selanjutnya dipetakan berdasarkan kontribusi pendidikan literasi terhadap pembentukan budaya antikorupsi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Pendidikan Literasi terhadap Pencegahan Korupsi

Aspek Literasi	Dampak terhadap Pencegahan Korupsi
Literasi kritis	Membentuk kemampuan menganalisis penyimpangan sosial
Literasi digital	Membantu masyarakat memilah informasi dan propaganda
Literasi hukum	Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga
Literasi sosial	Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik
Literasi karakter	Menanamkan nilai integritas dan tanggung jawab
Literasi media	Mengurangi manipulasi informasi dan hoaks
Literasi politik	Mendorong kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik

Berdasarkan Tabel 3, pendidikan literasi memiliki kontribusi multidimensional terhadap pencegahan korupsi. Literasi tidak lagi dipahami hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis, melainkan sebagai kemampuan memahami realitas sosial secara reflektif dan kritis. Individu yang memiliki kemampuan literasi yang baik cenderung lebih sadar terhadap pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, penguatan budaya literasi dapat menjadi strategi preventif jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang lebih kritis, demokratis, dan berintegritas.

Hasil sintesis terhadap 30 rujukan juga menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang efektif tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan budaya literasi yang kuat. Pendidikan literasi memungkinkan individu memahami dampak sosial korupsi secara lebih mendalam, sekaligus membangun keberanian moral untuk menolak berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan. Dalam perspektif Paulo Freire, literasi bukan sekadar kemampuan membaca teks, tetapi kemampuan “membaca dunia” secara kritis dan reflektif. Oleh sebab itu, pendidikan literasi yang terintegrasi dengan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum, aktif mengawasi kebijakan publik, dan berani memperjuangkan keadilan sosial.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan literasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembentukan budaya antikorupsi dalam kehidupan masyarakat modern. Literasi tidak lagi dipahami hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi berkembang menjadi kemampuan memahami informasi, menilai realitas sosial secara kritis, dan membangun kesadaran reflektif terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri (2024) yang menjelaskan bahwa literasi digital berbasis nilai Pancasila mampu memperkuat ketahanan moral masyarakat dalam menghadapi aktivitas koruptif di ruang digital. Selain itu, Fernanandes et al. (2024) menegaskan bahwa literasi antikorupsi dapat menjadi strategi edukatif dalam membentuk kesadaran sosial mengenai pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam kehidupan publik. Dengan demikian, penguatan literasi

berkontribusi terhadap terbentuknya masyarakat yang lebih kritis dan tidak mudah menerima praktik penyalahgunaan kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar.

Dalam perspektif pedagogi kritis (*critical pedagogy*), literasi memiliki fungsi transformasional karena mendorong individu memahami hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan ketidakadilan sosial. Gagasan Paulo Freire mengenai kemampuan “membaca dunia” menunjukkan bahwa pendidikan harus mampu membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungannya, termasuk praktik korupsi. Penelitian Al Ayyubi et al. (2025) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi mampu meningkatkan keberanian mahasiswa dalam mengkritisi penyimpangan sosial dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Temuan tersebut diperkuat oleh Muhajir (2022) yang menjelaskan bahwa penguatan *digital literacy* membantu masyarakat memilah informasi secara rasional sehingga tidak mudah dipengaruhi propaganda politik, manipulasi informasi, maupun pembenaran terhadap perilaku koruptif. Oleh sebab itu, pendidikan literasi menjadi instrumen penting dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan aktif dalam mengawasi kehidupan sosial-politik.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi yang diberikan sejak usia sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada pemahaman hukum dan pemberian sanksi, tetapi lebih menekankan internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Shaliadi dan Dannur (2023) menjelaskan bahwa sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun budaya antikorupsi melalui pembelajaran berbasis nilai integritas dan pembiasaan perilaku etis di lingkungan pendidikan. Temuan tersebut diperkuat oleh Nurul Hafiza et al. (2024) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pendidikan antikorupsi pada tingkat sekolah mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak negatif korupsi terhadap kehidupan sosial dan pembangunan bangsa. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter antikoruptif bagi generasi muda.

Selain sekolah, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam membangun budaya integritas di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk individu yang memiliki tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap persoalan sosial. Penelitian Aulia et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap etika publik dan pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan itu, Firdaos et al. (2024) menjelaskan bahwa pendidikan tinggi Islam memiliki kontribusi besar dalam memperkuat integritas mahasiswa melalui penguatan nilai religius, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai keadilan dan kejujuran.

Dalam konteks perkembangan masyarakat digital, teknologi informasi dan media sosial turut memengaruhi pola pengawasan terhadap praktik korupsi di ruang publik. Akses informasi yang semakin terbuka memungkinkan masyarakat terlibat lebih aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah serta mengawasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian Cahyadi (2025) menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai instrumen pengawasan publik yang efektif dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Temuan tersebut diperkuat oleh Wahdania dan Suhab (2025) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan website desa sebagai sarana transparansi publik mampu meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan pada tingkat lokal. Oleh

karena itu, penguatan literasi digital menjadi kebutuhan penting agar masyarakat mampu menggunakan media informasi secara kritis, bertanggung jawab, dan tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi yang dapat melemahkan pengawasan sosial terhadap praktik korupsi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan besar dalam menciptakan budaya birokrasi yang bersih dan transparan. Korupsi cenderung berkembang dalam lingkungan sosial yang pasif, minim pengawasan, dan rendah kesadaran kritis masyarakatnya. Maritza dan Taufiqurokhman (2024) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan publik mampu meningkatkan akuntabilitas birokrasi serta memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, Albab et al. (2024) menemukan bahwa edukasi sosial berbasis kesadaran kolektif dapat memperkuat komitmen masyarakat dalam membangun lingkungan yang antikorupsi dan berorientasi pada kepentingan publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada penegakan hukum formal, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan budaya sosial yang menjunjung nilai integritas.

Di sisi lain, hasil penelitian memperlihatkan bahwa rendahnya literasi hukum masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memahami dampak korupsi secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat cenderung permisif terhadap penyalahgunaan wewenang karena minimnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pengawasan publik. Mas'ud et al. (2025) menjelaskan bahwa pendidikan bahasa Indonesia berbasis literasi hukum dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami regulasi serta membangun kesadaran hukum di era digital. Temuan ini diperkuat oleh Busriadi dan Saleh (2025) yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi hukum berpengaruh terhadap peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial dan membangun perilaku yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan literasi hukum menjadi bagian penting dalam membentuk masyarakat yang sadar terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan korupsi secara preventif dan berkelanjutan. Literasi yang terintegrasi dengan pendidikan karakter, pendidikan hukum, dan pendidikan antikorupsi mampu membentuk individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kesadaran sosial, dan keberanian menolak berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibawa et al. (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan langkah preventif penting dalam menekan perilaku koruptif di masyarakat. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi konsep literasi kritis Paulo Freire dengan pendidikan antikorupsi sebagai strategi pembentukan kesadaran sosial masyarakat di era digital. Oleh karena itu, penguatan budaya literasi perlu menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan nasional untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap nilai keadilan publik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan literasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun budaya antikorupsi di tengah perkembangan masyarakat modern dan era *digital society*. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai kemampuan memahami realitas sosial, berpikir kritis, serta menilai berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan secara rasional dan objektif. Penguatan literasi yang dipadukan dengan pendidikan karakter, pendidikan hukum, dan pendidikan antikorupsi mampu membentuk individu yang memiliki kesadaran moral, integritas, serta tanggung jawab sosial

yang lebih baik. Dengan demikian, budaya literasi dapat menjadi pendekatan preventif yang efektif dalam menekan berkembangnya perilaku koruptif baik di lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa rendahnya tingkat literasi berpotensi melahirkan sikap permisif terhadap praktik korupsi karena masyarakat kurang memiliki kemampuan untuk memahami dampak penyalahgunaan kekuasaan secara kritis. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang baik cenderung lebih aktif dalam melakukan pengawasan sosial, mendorong transparansi publik, serta menuntut akuntabilitas pemerintahan secara lebih terbuka. Oleh sebab itu, penguatan budaya literasi perlu dijadikan bagian penting dalam kebijakan pendidikan nasional melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, perguruan tinggi, dan lingkungan sosial masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas program pendidikan literasi antikorupsi serta pengaruh literasi *digital* terhadap pembentukan perilaku antikorupsi pada generasi muda di era *Society 5.0*.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, U., Kurniawan, D., Yuniarti, Y., Yuliana, N. A., & Dewi, C. K. (2024). Sosialisasi peran penting masyarakat dalam mewujudkan birokrasi bersih dan anti korupsi melalui kesadaran kolektif di Desa Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 1(4), 67–75. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i4.602>
- Al Ayyubi, I. I., Prayetno, E., Apriyanti, N. S. N., & Al-Ghatnaini, R. A. S. (2025). Between awareness and resistance: Do anti-corruption education and deradicalisation encourage students to be critical? *Journal of Education and Learning Sciences*, 5(2), 18–29. <https://doi.org/10.56404/jels.v5i2.130>
- Alfaro, E. (2022). Understanding the corruption perceptions index. In *Modern Indices for International Economic Diplomacy* (pp. 233–270). Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-84535-3_9
- Al-farroz, I. N. I. (2025). Strategi pencegahan korupsi di Indonesia: Pendekatan pendidikan, transparansi, dan partisipasi publik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03). <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1091>
- Aulia, S., Fathurrizqoh, U., & Wahyudi, W. (2024). Penerapan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3). <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.92180>
- Aziza, S. N. (2022). Pentingnya pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46–54. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.5>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>
- Busriadi, B., & Saleh, M. (2025). Pengaruh partisipasi masyarakat, sosialisasi dan edukasi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 4890–4905. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>
- Cahyadi, J. (2025). Peran media sosial dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 363–371. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3575>

- Channiago, E., Gomang, J. H., Cahyani, I. F., Ginting, F. T., & Isnin, H. (2022). Media and character education in preventing corruption in Indonesia: The future challenges. *Indonesia Media Law Review*, 1(2), 199–230. <https://journal.unnes.ac.id/journals/imrev/article/view/21738>
- Eiamnate, N., Suphattanakul, O., Maliwan, E., Chumthong, K., Ketkaew, W., & Thadee, W. (2023). Anti-corruption behaviors of higher education students. *Journal of Higher Education Theory & Practice*, 23(3). <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i3.5846>
- Fernandes, A., Pratiwi, F. N., Waruwu, N. P. S., & Safitri, W. (2024). Literasi anti korupsi sebagai strategi edukasi. *Jurnal Ilmiah IPS dan Humaniora (JIH)*, 2(3), 68–72. <https://doi.org/10.61116/jiuh.v2i3.305>
- Firdaos, R., Wahyudin, W., Mulyosaputro, P., Gunawan, W., & Vitisia, V. (2024). Peran pendidikan tinggi Islam dalam membangun karakter dan integritas mahasiswa Muslim. *Irfani*, 20(1), 1–19. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir/article/view/5137>
- Kolombo, S. A., Jende, A. S., Rare'a, R., Tohero, A. V., Wutabisu, M. Y., Pesoyoki, C., ... & Guampe, F. A. (2025). Membangun budaya anti korupsi di Desa Buyumpondoli: Strategi edukasi dan partisipasi masyarakat. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 83–95. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v4i2.4099>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan KPK 2023*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Mas'ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan bahasa Indonesia sebagai sarana penguatan literasi hukum di era digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21. <https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i2.24455>
- Muhajir, S. N. (2022). Literasi digital: Sebuah kajian pengabdian kepada masyarakat. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 110–117. <https://doi.org/10.52434/jpm.v1i3.2247>
- Nurudin, N., Fauzi, M. A. N., & Barory, C. (2024). Pendidikan anti korupsi: Konsep pendidikan karakter dan tantangannya. *Educatus*, 2(1), 19–26. <https://ejournal.prismaindo.or.id/index.php/Educatus/article/view/8>
- Nurul Hafiza, Sari Rambah Andini, Ilham Hudi, Winda Andini, Shakila Putri, Abelia Ananda, ... Hanisah Putri. (2024). Peran pendidikan antikorupsi dalam mencegah korupsi sejak dini melalui sosialisasi di SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru. *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(4), 158–166. <https://doi.org/10.62951/dinsos.v1i4.895>
- Othman, I. W., Mokhtar, S., & Esa, M. S. (2022). Corruption offences education literacy in preventing the loss of national treasures: A review of challenges and concerns. *International Journal of Education, Psychology and Counselling*, 7(47), 639–665. <https://gaexcellence.com/ijepc/article/view/3538>
- Pratiwi, D. (2023). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa sekolah dasar. *Proceedings Series of Educational Studies*, 178–184. <https://conference.um.ac.id/index.php/pses/article/view/8141>
- Putri, N. A., Handoyo, E., Martitah, M., & Mustofa, M. S. (2023, June). Penguatan literasi pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 6(1), 561–569. <https://proceedings.unnes.ac.id/snpasca/article/view/2183>

- Putri, O. F. N. (2024). Literasi digital dan Pancasila untuk menangkal aktivitas korupsi di dunia maya. *Jurnal Ilmiah IPS dan Humaniora (JIH)*, 2(3), 79–83. <https://doi.org/10.61116/jiuh.v2i3.306>
- Salam, A. M. I., Prayetno, B., & Taufiq, M. S. (2024). Tren dan tantangan kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia: *Trends and challenges of character education and anti-corruption policy in Indonesia: A review of the sociology of religion literature*. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v3i1.10895>
- Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). Urgensi pendidikan anti korupsi di sekolah. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1(1), 15–22. <https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.5>
- Suyitno, S., Sukmayadi, T., & Maarif, M. (2024). Sosialisasi literasi antikorupsi berbasis Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kayen Condongcatur Yogyakarta. *Education Journal: Journal Educational Research and Development*, 8(1), 126–133. <http://jurnal.unipar.ac.id/index.php/ej/article/view/1653>
- Ulya, V. F., & Anisah, Z. (2021). Pembentukan nilai karakter integritas melalui gerakan literasi sekolah pada anak MI/SD. *PREMIERE: Journal of Islamic Elementary Education*, 3(1), 43–56. <https://doi.org/10.51675/jp.v3i1.118>
- Wahdania, N., & Suhab, R. F. (2025). Pengelolaan website Desa Nepo sebagai media informasi dan transparansi publik. *Macoa: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 25–31. <https://journal.itbmpolman.ac.id/index.php/jurnalmacoa/article/view/127>
- Wardan, W. (2025). Makna akuntabilitas publik: Studi kualitatif pada pemerintah daerah. *Jurnal Economina*, 4(8), 269–276. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i8.1568>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>
- Wibowo, A. (2022). Kesadaran generasi muda dalam mewujudkan tindakan anti korupsi sebagai *agent* perubahan untuk Indonesia lebih maju. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 269–277. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/1820>